

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kajian Hubungan Internasional, topik hubungan bilateral merupakan salah satu kajian yang paling disorot perkembangannya, karena melingkupi interaksi antar negara berdaulat maupun bukan negara berdaulat, perkembangannya sangatlah beragam dan dinamis, serta terdapat pihak-pihak yang berinteraksi yang dapat dibagi menjadi aktor negara (*state actors*) maupun aktor non negara (*non state actors*) yang memiliki peran penting terhadap faktor lain dari luar yurisdiksi efektif satuan politiknya. (Perwita dan Yani, 2005:7).

Seringkali terjadi pasang-surut yang menyebabkan polemik dalam perkembangan hubungan bilateral, tidak terkecuali kasus Taiwan dan Tiongkok, yang dapat dibilang juga kasus unik dan langka. Polemik yang merupakan serapan dari bahasa Yunani (*polemikos*) bermakna asli “mirip perang” sedangkan secara bahasa adalah diskusi ataupun perdebatan sengit yang diadakan di media massa/umum.

Hubungan kedua pihak tersebut telah diatur dalam "Konsensus 1992" atau "Konsensus 1992 adalah istilah politik yang diciptakan oleh politisi Kuomintang (KMT) Su Chi, merujuk pada hasil pertemuan pada tahun 1992 antara perwakilan semi-resmi Republik Rakyat Tiongkok (PRC) di daratan dan Republik Tiongkok (ROC) di Taiwan. Apakah ada Konsensus semacam itu sedang dalam sengketa di Taiwan. Kuomintang (KMT) mengklaim bahwa konsensus semacam itu ada

dengan makna yang berbeda dari Tiongkok (Partai Komunis Tiongkok hanya mengakui konsensus bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan tidak mengakui interpretasi berbeda dari Tiongkok yang diklaim KMT), sedangkan Partai Demokratis Progresif (DPP) dan Presiden ROC pada 1992, Lee Teng-hui, membantah keberadaan konsensus 1992.

Istilah itu sendiri diajukan pada April 2000 oleh politisi Kuomintang, Su Chi, yang kemudian pada 2006 mengakui bahwa ia mengarang istilah itu. Istilah tersebut, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pengamat, berarti bahwa, pada subjek "One China principle", kedua belah pihak mengakui hanya ada satu "Tiongkok": kedua daratan Tiongkok dan Taiwan milik Tiongkok yang sama, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk menginterpretasikan arti dari Tiongkok itu menurut definisi mereka sendiri.

Kritik terhadap istilah itu, termasuk Partai Progresif Demokratik Taiwan (DPP), menunjukkan bahwa karena tidak ada kesepakatan mengenai makna dan saling pengertian antara Tiongkok dan yang pemerintah, ROC atau RRC, mewakili "Tiongkok", itu bukan "konsensus" sama sekali. Mereka juga mengkritik istilah tersebut dengan alasan bahwa itu tidak diciptakan bersamaan dengan pertemuan itu: menurut mantan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Su Chi, ia menciptakan istilah itu pada tahun 2000, delapan tahun setelah pertemuan 1992.

Delapan tahun terakhir, hubungan Tiongkok dan Taiwan dinilai tenang setelah Ma Ying-jeou terpilih sebagai presiden pada tahun 2008. Ma menandatangani serangkaian kesepakatan ekonomi utama dengan Beijing dan

mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping pada November 2015 di Singapura, negara yang bersikap netral kepada keduanya.

Tiongkok menilai Taiwan, provinsi yang memiliki pemerintahan sendiri, kerap berupaya untuk lepas dari kedaulatan Tiongkok, sehingga Tiongkok tak segan menerapkan kekerasan, jika diperlukan, untuk mengendalikan Taiwan. Sejarah mencatat pasukan Nasionalis yang kalah melarikan diri ke Taiwan pada 1949, seusai perang saudara Tiongkok. (<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160205190712-113-109228/china-sebut-hubungan-dengan-taiwan-kompleks-dan-sensitif>). Bagi pemerintah Tiongkok, Taiwan merupakan salah satu isu politik yang paling sensitif, dan menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan Partai Komunis, melebihi isu sengketa wilayah dengan sejumlah negara di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini sangatlah beralasan karena isu Taiwan dapat memecah-belah persatuan di Tiongkok dan meningkatkan gerakan separatisme semakin menjamur.

Hubungan kedua negara, tidak disebut hubungan bilateral atau hubungan domestik. Karena secara defacto taiwan memiliki pemerintahan sendiri, baik taiwan dan tiongkok memiliki badan administrasi khusus untuk menangani hubungan *Cross-Strait Relations*. Dari taiwan kementerian urusan daratan (*Mainland affairs Council*) tiongkok terdapat kementerian urusan taiwan (*Taiwan Affairs Council*) kedua institusi ini berperan dalam menjembatani kebijakan-kebijakan dari kedua belahpihak (https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php/ di akses pada 10 januari 2019).

Sejak kemenangan telak Tsai Ing-wen dan Partai Progresif Demokratik yang dipimpinnya pada pemilihan presiden dan parlemen Taiwan Januari 2016 lalu, Tiongkok memperingatkan Taiwan untuk tidak berupaya memerdekakan diri. Tiongkok menegaskan akan mempertahankan kedaulatan negara.

Dalam Hubungan Internasional, terdapat teori realis dan idealis sebagai yang utama. Polemik hubungan bilateral antara Taiwan dan Tiongkok tidak terlepas dari teori realis dan idealis. Tiongkok dan Taiwan memang selayaknya tidak akan pernah terpisahkan. Selama lebih dari 60 tahun pembangunan dari hubungan lintas selat menunjukkan bahwa jarak waktu dan adu kekuatan dapat memungkinkan membuat kedua negara terpisah. Saat ini, perkembangan hubungan lintas selat dihadapkan dengan pilihan arah dan jalan. Pertemuan antar keduanya dapat dikatakan sebagai pertemuan bersejarah dan mungkin saja tidak akan terulang sehingga prestasi perkembangan damai hubungan lintas-selat diharapkan tidak akan hilang. Kedua negara harus mempunyai tekad besar untuk mempromosikan perdamaian dan hubungan yang berlangsung harus didasarkan pada ketulusan, kebijaksanaan dan kesabaran.

Adanya pertemuan tersebut semakin menipiskan rasa kecemasan akan meledaknya konflik atau perang antara Tiongkok versus Taiwan. Ini didukung fakta meski di tataran politik Tiongkok-Taiwan bermusuhan, pada sektor ekonomi, khususnya dalam hal bisnis dan investasi, keduanya justru bisa saling bermitra mengingat sejak tahun 2002 Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar bagi Taiwan.

Pesta demokrasi negara Taiwan telah memberikan pencerahan baru bagi perkembangan politik. Setidaknya hal tersebut telah diprediksi dengan naiknya Tsai sebagai calon presiden yang kemudian menyingkirkan calon dari wakil partai penguasa Kuomintang (KMT) yang bersahabat dengan Tiongkok, Eric Chu dengan perolehan suara 32,5%. Di Taiwan, dukungan untuk DPP sendiri bertambah banyak sejak 2014, ketika ratusan mahasiswa menduduki parlemen Taiwan selama berminggu-minggu untuk menyampaikan protes terhadap undang-undang perdagangan Tiongkok. Dukungan bagi Tsai melonjak karena pemilih makin gelisah atas upaya pendekatan dengan Tiongkok yang dilakukan mantan Presiden Taiwan dari KMT Ma Ying-jeou baru-baru ini. Ma harus lengser setelah memimpin selama dua periode (delapan tahun).

Akibat perekonomian stagnan, rakyat Taiwan kecewa atas penandatanganan perjanjian dagang dengan Tiongkok yang bisa mengurangi keuntungan bagi masyarakat umum di Taiwan. DPP lebih berhati-hati mendekati Tiongkok, meskipun Tsai berulang kali menyampaikan keinginannya untuk mempertahankan status quo.

Tsai membawa kelompok oposisi yang dipimpinnya untuk menang dan ini menjadi keunggulan bagi kelompok pro-kemerdekaan Taiwan. Banyaknya pendukung Tsai dikarenakan pihak Kuomintang dianggap terlalu dekat dengan Tiongkok sehingga mengakibatkan meningkatnya hubungan dengan Tiongkok. Para pemilih merasa tidak nyaman dengan hubungan yang terlalu dekat tersebut seiring dengan lemahnya perekonomian dan kekecewaan terhadap pakta-pakta perdagangan yang ditandatangani bersama Tiongkok, tetapi gagal memberi

keuntungan bagi warga Taiwan. Dalam pidato kemenangannya, Tsai memperingatkan Tiongkok bahwa penindasan akan merugikan hubungan Taiwan dan Tiongkok (hubungan lintas selat). Ia juga menginginkan jika sistem demokrasi, jarak identitas nasional dan internasional harus dihargai.

Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump membuat marah Tiongkok bulan ini ketika berbicara dengan Tsai, yang meretakkan puluhan tahun preseden dan meragukan komitmen pemerintahannya terhadap kebijakan Beijing mengenai "One China Policy". Militer Tiongkok telah mengkhawatirkan apa yang dilihatnya sebagai dukungan Trump kepada Taiwan dan sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang kuat demi mencegah kepulauan itu bergerak menuju kemerdekaan, kata beberapa sumber yang memiliki hubungan /dengan perwira militer senior.

Hubungan Tiongkok dan Taiwan telah memburuk sejak Presiden Tsai, yang mengetuai partai pro-kemerdekaan yang berkuasa, Partai Progresif Demokratik, terpilih pada Januari lalu. Bahkan di saat dirinya sudah berjanji menjaga perdamaian dengan Tiongkok, Beijing ingin Tsai mengakui prinsip "One China Policy", yakni Taiwan bagian dari Tiongkok, namun tujuh bulan sejak menjabat pada Mei, Tsai belum melakukannya.

Beijing membekukan saluran komunikasi resmi dengan Taipei pada Juni. Dan, bulan ini, hubungan dengan negara kecil Afrika, Sao Tome, dihidupkan kembali hanya lima hari setelah Tiongkok memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tiongkok juga melayarkan armada kapal perang, yang dipimpin

kapal induk tunggalnya, di sekitar kepulauan itu dalam latihan yang disebut rutin. "Beberapa hal telah terjadi antara Taiwan dan Tiongkok atau kawasan ini. Meskipun kami merasakan itu, kami akan tenang menghadapi mereka," kata Tsai. Dia menambahkan, kedua belah pihak harus fleksibel dan bahwa ada ruang untuk berbicara dengan Tiongkok. Janji Taiwan demi menjaga perdamaian dan stabilitas tidak berubah dan niat baik terhadap Tiongkok tidak berubah, katanya, menambahkan bahwa Taiwan tidak mau ditekan.

"Hubungan lintas-selat tentu menjadi tantangan bagi rakyat Taiwan dan untuk negara ini," katanya. "Tapi jangan lupa bahwa kita negara berdaulat, bangsa yang merdeka, dan ini merupakan pengakuan secara kolektif (di Taiwan)," kata Tsai.

Pasukan nasionalis yang kalah melarikan diri ke Taiwan pada 1949 pada akhir perang saudara Tiongkok. Beijing pun tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk menundukkan Taiwan di bawah kendalinya. Jalanan drama masih berlanjut dengan singgahnya Tsai di AS, bulan depan, dalam kunjungan ke Amerika Latin. Tiongkok telah menyerukan AS untuk memblokir transit tersebut. Tsai mengatakan, transit itu tidak resmi, dan spekulasi tentang hal itu "berlebihan".

Reaksi Tiongkok atas Kemenangan Presiden Terpilih Taiwan dipantau oleh pemerintah Tiongkok dan juga warga Tiongkok. Pantauan tersebut berakibat pada penolakan Tiongkok atas hasil pemilihan presiden Taiwan. Tiongkok mengatakan, urASn Taiwan adalah urASn internal bagi negara tersebut. Hanya

ada satu Tiongkok di dunia dan pemilihan presiden di Taiwan tidak mengubah kenyataan ini termasuk pada pengakuan internasional mengenai hasil pemilu. Kemenangan Tsai dalam pemilu Taiwan direspons oleh Tiongkok dengan memberi penegasan terhadap konsensus 1992 yaitu *One China Policy*. Penegasan ini merupakan gambaran bahwa Pemerintah Tiongkok tidak bereaksi berlebihan terhadap perubahan politik di Taiwan dan tetap menginginkan status quo. Tidak heran, respons Tsai pun melunak dengan menyatakan bahwa dirinya akan menjamin status quo hubungan Taiwan dengan Tiongkok.

Hubungan Tiongkok dan Taiwan telah membaik semenjak presiden sebelumnya, Ma Ying-Jeou, menjabat Presiden Taiwan pada tahun 2008. Ini ditandai adanya hubungan ekonomi yang terus membaik, peningkatan hubungan pariwisata, dan kerja sama pakta perdagangan. Pada tahun 2012 Tiongkok menyambut dengan senang terpilihnya kembali Ma. Bahkan kemenangan Ma adalah pilihan yang dibuat warga Taiwan untuk lebih dekat dengan Tiongkok. Hasil pemilu tersebut meningkatkan hubungan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan merupakan keinginan umum semua orang di Taiwan. Namun seiring perkembangan justru rakyat seolah kecewa dengan kepemimpinan Ma yang cenderung menjadi dekat dan bergantung pada Tiongkok. Terbukti dengan munculnya unjuk rasa di Taiwan yang memprotes pertemuan kedua pemimpin di tahun 2015 lalu di Singapura sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat Taiwan.

Menjelang Pemilu kemarin, pemerintah Tiongkok telah berkali-kali menentang kehendak Taiwan untuk merdeka. Lebih jauh lagi, setelah kemenangan Tsai, Kantor Urusan Taiwan Tiongkok memperingatkan akan menentang setiap

langkah menuju kemerdekaan Taiwan. Lemahnya pertumbuhan ekonomi Taiwan yang hanya mencapai 1 persen di tahun 2015, dan bertambahnya angka pengangguran serta stagnansi pendapatan, dapat menyulut gerakan-gerakan pro kemerdekaan Taiwan lebih cepat dalam empat tahun ke depan. Belum lagi publik Taiwan tidak merasa puas terhadap eratnya hubungan Taiwan dengan Tiongkok pada era Presiden sebelumnya yang dianggap menyebabkan ketergantungan dan menghilangkan independensi Taiwan.

Kemenangannya diperkirakan akan mendorong babak baru dalam upaya kemerdekaan Taiwan dari Tiongkok, dan dapat berujung pada ketidakstabilan di Tiongkok. Selain itu, Pemerintah Tiongkok juga bertekad untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan ketidakpedulian akan perubahan yang mungkin terjadi di Taiwan. Namun, Pemerintah Tiongkok tidak akan pernah mengubah kebijakan untuk menentang kemerdekaan resmi Taiwan dan teguh pada satu kesatuan yaitu daratan dan Taiwan milik Tiongkok.

Hasil dari pemilihan presiden di Taiwan tidak mengubah fakta dan konsensus masyarakat internasional. Pemerintah Tiongkok sangat berharap dunia internasional mengambil langkah-langkah nyata untuk mendukung pengembangan damai hubungan lintas Selat Taiwan. Selain itu, Tiongkok perlu menghargai demokrasi di Taiwan. Hal ini sebagai penegasan untuk dapat memastikan bahwa kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menemukan cara-cara yang dapat diterima bagi stabilitas keamanan kawasan. Kemenangan Tsai memang telah

berhasil menuliskan sejarah baru bagi Taiwan, tetapi dari kemenangan itulah Tiongkok justru melihat dapat memicu eskalasi dalam hubungan kedua negara.

Pada akhir Perang Dunia II (PD II), Republik Tiongkok mengambil alih Taiwan setelah Jepang menyerah. Taiwan saat itu adalah jajahan Jepang saat Gerakan Kominka atau Proses Japanisasi subjek dari Kekaisaran Jepang terjadi. Karena Jepang adalah musuh Tiongkok selama PD II, pemerintah Republik Tiongkok mengalami kesulitan menganggap rakyat Taiwan sebagai rekan senegara mereka. Padahal rakyat Taiwan pun bahkan tidak berbahasa Mandarin saat itu.

Selama Perang Saudara Tiongkok (1946-1950), Kuomintang (KMT), yang dipimpin oleh Chiang Kai-Shek, memutuskan untuk mengkonsolidasi kekuatan pemerintahan terasing miliknya di Taiwan setelah pemerintahan tersebut dikalahkan oleh Tentara Pembebasan Rakyat di Tiongkok milik PKT pada tahun 1949. Selama periode Teror Putih (1949-1987) dan setelahnya, gerakan demokrasi Taiwan menghabiskan satu dekade untuk membangun sebuah masyarakat yang bebas dan demokratis. Mereka akhirnya berhasil, dan dalam pencarian mereka untuk sebuah masyarakat baru, tertempal sebuah identitas bangsa Taiwan yang baru dan agak berbeda dengan Tiongkok.

Adapun penelitian sebelumnya yang pernah membahas tentang *Cross-strait Relations* Tiongkok-Taiwan pada masa Tsai Ing-Wen adalah penelitian yang disusun oleh Ian Sherridan yang berjudul “ Hubungan Taiwan dan Tiongkok dalam status kedaulatan Taiwan” dari program studi ilmu politik Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2018.

Penelitian yang disusun Ian Sherridan lebih menitik beratkan status quo “One China Policy” serta langkah yang ditempuh Tiongkok dalam menyikapi keikutsertaan Taiwan dalam lembaga-lembaga Internasional dan keberhasilan Tiongkok menjalin hubungan bilateral dengan bekas negara-negara yang sebelumnya menjalin hubungan bilateral dengan Taiwan.

Penelitian selanjutnya dari Fradika tahun 2018 yang berjudul *ONE CHINA POLICY DALAM HUBUNGAN CROSS STRAIT RELATION TAIWAN-TIONGKOK* Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai asal-usul Taiwan dan *One China Policy* dalam hubungan *cross-strait relation* Taiwan-Tiongkok. Kemudian, untuk mempermudah pemahaman bagaimana awal mula berdirinya Nasionalis KMT dan Komunis PKC, perlu adanya sedikit penjabaran tentang sejarah Tiongkok yang diawali dari revolusi 1949 atau yang dikenal dengan Perang Saudara. Kekalahan KMT yang diketuai Chiang Kai-Shek pada Perang Saudara membuatnya lari bersama jutaan pendukungnya ke Taiwan. Peristiwa tersebut adalah titik balik penyebab terjadinya *cross-strait relation* antara Tiongkok dan Taiwan.

Maka dari beberapa penjelasan yang diuraikan diatas terlihat belum ada yang meneliti mengenai kebijakan-kebijakan era Tsai Ing-Wen, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian serupa dengan judul “ **Polemik Cross Strait Relations Taiwan-Tiongkok era kepemimpinan Tsai Ing-Wen 2016-2018**” Yang lebih menitik beratkan mengenai kebijakan luar negeri di era Tsai Ing-Wen yang bertolak belakang dengan pendahulunya Ma Ying-Jeou terhadap Tiongkok sehingga menyebabkan polemik.

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa mata kuliah dalam kurikulum Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu:

1. Dinamika Politik Internasional

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai perkembangan isu-isu terkini dalam hubungan internasional, utamanya mengenai konflik yang masih berlangsung dikarenakan perbedaan suatu politik. Mata kuliah ini membantu penulis dalam memahami dinamika konflik dan politik yang berlangsung sehingga dapat membedakan suatu konflik yang masih berlangsung dan mana yang sudah terselesaikan.

2. Analisis Politik Luar Negeri

Mata kuliah ini menjabarkan mengenai kebijakan politik luar negeri suatu negara. Mata kuliah ini membantu penulis untuk menganalisa kebijakan politik luar negeri dan dampaknya terhadap stabilitas Negara itu sendiri, kawasannya serta dunia. Dalam hal ini utamanya mengenai kebijakan luar negeri Taiwan.

3. Hubungan Internasional di Asia Timur

Mata kuliah ini menjabarkan pemahaman mengenai kawasan Asia Timur secara umum sebagai kawasan tanpa integrasi ataupun regionalism dikarenakan faktor historis dan primodarilisme yang kuat di setiap Negara. Negara-negara di kawasan ini juga memiliki peran vital dalam ekonomi dan politik internasional karena merupakan salah satu dari kawasan paling terproduktif selain Amerika Utara dan Eropa

Barat. Mata kuliah ini menambah wawasan penulis untuk lebih memahami mengenai interaksi antara Taiwan dan Tiongkok yang berada di kawasan Asia Timur, utamanya pasca-kepemimpinan Tsai Ing-Wen di tahun 2016 serta dampaknya terhadap perkembangan hubungan internasional di kawasan Asia Timur.

4. War & Peace

Mata kuliah ini menjabarkan mengenai aspek historis suatu konflik dan resolusi konflik dalam hubungan internasional. Mata kuliah ini membantu memaparkan dinamika konflik yang masih berlangsung di dunia beserta dampaknya terhadap stabilitas kawasan di sekitarnya serta stabilitas nasional Indonesia. Mata kuliah ini menambah wawasan penulis untuk dapat memahami bagaimana dan kenapa suatu konflik muncul, berakhir dan ada yang masih berlangsung hingga kini, contohnya kasus Taiwan.

// Hubungan bilateral Taiwan dan Tiongkok tidak terlepas dari historis kedua negara, yang sejak di masa lampau diketahui adanya perbedaan pandangan ideologis dan juga langkah-langkah kebijakan pemerintahannya. Tiongkok berlandaskan komunis sosialis, bahkan selanjutnya sering disebut sebagai negara “Tirai Bambu” yang kukuh dengan komunisme kerakyatannya yang sentralistik. Namun kemudian di dekade-dekade era globalisasi, ternyata selain berlandaskan “Komunisme Terpimpin”, juga Tiongkok seolah-olah jadi negara yang berpijak di dua madzhab. Satu kaki berlandaskan komunis, satu lagi

beralas kaki dengan model “Liberal – Kapitalisme” yang merambah dan mengembangkan kebijakan-kebijakannyaterutama politik perekonomian, untuk lebih bersaing dengan negara-negara maju, bahkan dengan AS, saat ini santer berpolemik “Perang Dagang” yang menggoyang pASran globalisasi.

Sementara itu Taiwan dengan pandangan ideologis yang “Nasionalis Demokratis”, tetap bergeming dan semakin lebih berkreatifitas menggali segenap potensinya, menumbuhkan inovasi-inovasi dan memperkuat fundamen nasionalisnya, baik segi politik maupun perkembangan-perkembangannya terus melaju, yang kemudian lahir Taiwan sebagai satu diantara negara-negara yang disebut Macan Asia.

Taiwan yang terus menerus memantapkan diri dan menjadi negara maju, tentu selain upaya kerja kerasnya sendiri, terdapat berbagai kontribusi dari jalinan hubungan internasionalnya, yang diantaranya hubungan bilateral dengan AS. Hubungan diplomatic dengan AS, baik segi politik yang terkait juga dengan kepentingan ideologis liberalisme demokratis membendung komunisme Tiongkok, segi ekonomi dan pertahanan keamanan mewarnai kolaborasi Taiwan dengan AS.

Geopolitik Taiwan-Tiongkok menjadi hal yang sangat menarik perhatian, karena terdapat banyak fenomena dan realita yang unik. Banyak fakta

yang menunjukkan adanya ketegangan, persaingan bahkan mendekati konflik yang mengkhawatirkan dan diyakini dapat berdampak terhadap stabilitas negara-negara tetangga secara regional serta tidak mustahil pula meluas menjadi masalah global.

Tiongkok sebagai negara yang menjelma jadi raksasa dunia, agaknya tidak akan berhenti mengembangkan kemajuannya di berbagai lini pasaran global. Demikian juga dalam hal yang terkait dengan Taiwan. Bahkan dengan dalih “Kesatuan Tiongkok Raya” yang mencakup Taiwan dan berbagai argumen yang dijadikan pangkal klaimnya, Tiongkok menghendaki Taiwan menjadi bagian negaranya dan merasa beralasan untuk digabungkan. Beberapa fenomena ini sering mengintimidasi, bahkan mengarah pada upaya aneksasi dengan manuver-manuver politik dan militernya.

Rangkaian hubungan Taiwan-Tiongkok dari waktu ke waktu terus berlanjut dengan aroma yang seolah tiada reda. Senantiasa terdapat ketidaksinkronan dan menyimpan bara dalam sekam. Gambaran perjalanan antar negara yang panjang, penuh gejala pertentangan dan berpolemik yang memacu konflik tersebut di atas, tentu merupakan hal yang mengkhawatirkan dan sangat merugikan hubungan bilateral. Hal demikian itu pada gilirannya dapat merembet, memicu dan mengganggu kondusifitas regional bahkan hubungan internasional yang bermuara pada berbagai aspek hidup dan kehidupan.

Kompilasi historis, baik realita maupun fenomena tersebut di atas, tidak terlepas dari peran kontribusinya terhadap fakta dan fenomena pada waktu di periode-periode berikutnya. “Historical Time” berkelanjutan dan terhubung dengan perodesasi rezim beserta warna watak kepemimpinan yang berkuasa di masa pemerintahannya. Hal demikian tidak terkecuali pula pada periode pasca kepemimpinan Tsai Ing Wen di Taiwan.

Polemik “Cross Straits Relations” saat Tsai Ing Wen berkuasa, ternyata menunjukkan hal yang sangat unik bahkan berbalut dalam kompleksitas yang spesifik.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti menarik perumusan masalah mayor sebagai berikut: **“Bagaimana permasalahan *Cross-Strait relations* Taiwan-Tiongkok yang menyebabkan polemik era-kepemimpinan Tsai Ing-Wen?”**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan rumusan masalah mayor di atas, maka peneliti menjabarkan kembali rumusan masalah mayor kedalam beberapa rumusan masalah minor, beberapa masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana situasi keamanan dan stabilitas hubungan Taiwan-Tiongkok sebelum dan sesudah kepemimpinan Tsai Ing-Wen?
2. Apa dampak dari polemik yang menyebabkan ketegangan hubungan antara Taiwan dan Tiongkok?
3. Sejauh mana peran negara lain dalam mempengaruhi *Cross-strait relations* Taiwan-Tiongkok?
4. Langkah apa yang ditempuh Taiwan maupun Tiongkok untuk meredakan ketegangan?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diajukan oleh peneliti agar mempersempit fokus terhadap masalah. Dari permasalahan yang ada, peneliti membatasi masalah yang dibahas dengan berfokus kepada hubungan bilateral dalam kurun waktu 2016-2018 dikarenakan dua hal, pertama karena 2016 adalah awal tahun Tsai Ing-Wen menjabat yang menjadi kajian pembahasan karena kebijakan-kebijakan terhadap Tiongkok yang bersebrangan dengan pendahulunya, Ma Ying-Jeou. Kedua karena di bulan November 2018 lalu Tsai Ing-Wen mengundurkan diri dari jabatan ketua partainya, Partai Demokratis Progresif (DPP) setelah partainya kalah dalam pilkada sehingga ia tidak memiliki peluang untuk mencalonkan diri pada pemilu selanjutnya. Setelah partainya tidak lagi meraih suara mayoritas rakyat Taiwan, pihak Beijing lebih berpikiran terbuka kepada Taiwan serta melunak dalam hubungan bilateral, contohnya pertengahan Desember lalu pihak Beijing

menyetujui forum bisnis antar Shanghai-Taipei ketika hasil suara pilkada Taiwan menyatakan partai yang diketuai Tsai kalah suara.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah supaya peneliti mampu menjelaskan polemik pasca-kepemimpinan Tsai Ing-Wen, peran Tiongkok terhadap identitas Taiwan dan dampaknya terhadap kawasan Asia Timur maupun dunia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang polemik dalam hubungan bilateral Tiongkok dan Taiwan.
2. Untuk mengetahui perkembangan permasalahan polemik Tiongkok dan Taiwan hingga kini
3. Untuk mengetahui dampak umum mengenai polemik terhadap Taiwan, kawasan Asia timur dan dunia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka serta dapat memberikan sedikit sumbangan bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai Hubungan Internasional di kawasan Asia Timur, Dinamika Politik Internasional dan War and Peace.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini disusun sebagai tugas akhir peneliti untuk menempuh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengalaman dan kemampuan peneliti, serta dapat dijadikan bahan tambahan informasi dan studi empiris bagi akademis maupun masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para akademisi hubungan Internasional, dan umum.